

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik ditengah – tengah masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945 merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut *World Bank* dalam Reza Attaburrobbi Annur (2013:410), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai,

Kemiskinan disebut sebagai masalah sosial, dan bahkan merupakan masalah sosial yang paling rumit dan sulit, karena kemiskinan mendatangkan berbagai gangguan terhadap kehidupan bermasyarakat. Ini tampak jelas dari fakta-fakta bahwa sebagian besar kejahatan terkait baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kemiskinan. Kasus-kasus seperti pencurian dan perampokan, misalnya, terkait langsung dengan kemiskinan, sedangkan kasus-kasus seperti pengangguran dan kondisi kesehatan yang buruk dengan segala konsekuensinya terkait secara tidak langsung dengan kemiskinan, karena masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan pendidikan yang memadai dan makanan yang bergizi.

Adapun Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Maka dari itu, upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif. Dalam hal ini ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. Yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Yang kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk mengurangi kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibatnya banyaknya jumlah orang dalam satu keluarga, ekonominya kurang baik, lapangan kerja yang masih kurang, pendidikan yang rendah, dan kurangnya keterampilan. Salah satu syarat awal untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan cara melakukan identifikasi terhadap kelompok dan wilayah sasaran yang ingin dituju dengan tepat. Program pengentasan dan nasib orang miskin sangat bergantung dari langkah awal yang dilakukan yaitu ketepatan dalam mengidentifikasi siapa yang dikategorikan miskin dan di mana dia tinggal.

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka dalam mengatasi kemiskinan pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2007 dengan meluncurnya Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai prioritas nasional dalam lima tahun mendatang (2010-2015) PKH pelaksanaannya dititikberatkan pada perluasan jangkauan pelayanan terhadap target RTSM dan wilayah pelaksanaan kegiatan PKH. Sesuai dengan ketentuan, salah satu strategi PKH adalah mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui Dinas Sosial masing-masing untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah. Dengan menggunakan sistem yang mekanisme yang telah diatur di dalam Pedoman Umum PKH 2007, pemerintah daerah dapat melanjutkan program ini terhadap RTSM peserta PKH apabila dipandang pendapatannya masih berada dibawah garis kemiskinan. Selan itu, pemerintah daerah juga dapat memperluas jangkauan pelayanan PKH kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) agar lepas dari masalah kemiskinan. Mengingat PKH adalah program prioritas nasional, maka tidak hanya Kementerian Sosial yang harus melaksanakannya tetapi pemerintah daerah juga bisa mengembangkan dan melanjutkannya sesuai dengan kemampuan dukungan APBD.

Pendampingan pemanfaatan dana bantuan dilakukan di tiap kecamatan dan bertujuan supaya para ibu rumah tangga penerima dana program Keluarga Harapan bisa menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Apabila ada penyelewengan penggunaan dana maka pihak Dinas Sosial akan dikenai sanksi penghentian bantuan, Permasalahan di Kota Metro terkait anak sekolah sangatlah beragam. Ada beberapa ibu rumah tangga yang mengalami keluhan dikarenakan banyaknya tanggungan sekolah anaknya, ada pula anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya, dan ada beberapa anak di Kota Metro yang berprestasi tetapi tidak bisa melanjutkan sekolah. Sehingga Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) perlu di implementasikan di Kota Metro. Karna diperlukan adanya bantuan program keluarga harapan (PKH) agar keluarga tersebut dapat digunakan dan dari pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan, seperti menyekolahkan anak dan mementingkan dan mengutamakan kesehatan.

Dikota metro dengan adanya program PKH bahwa yang menerima program keluarga harapan tidak semua orang dan hanya yang memenuhi kreteria penerima Program keluarga harapan, Berdasarkan hasil prasurevei yang telah dilakukan dibawah ini merupakan daftar data yang menerima pogram keluarga harapan (PKH) sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah keluarga penerima PKH diwilayah Kota Metro (2021).

No	Kecamatan	Jumlah
1	Metro Barat	505
2	Metro Pusat	1.444
3	Metro Selatan	504
4	Metro Timur	811
5	Metro Utara	763

Sumber: <https://dinsos.metrokota.go.id> (data tahun 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pemerintah mengatasi kemiskinan, kendala sebelum atau sesudah menerima program keluarga harapan, dan juga mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan memiliki kecerdasan melalui program keluarga harapan di kecamatan Metro yang berjudul **“PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA METRO (STUDI KASUS KECAMATAN METRO BARAT)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya kemiskinan yang disebabkan berbagai faktor. Dari permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah “Apakah program keluarga harapan (PKH) berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Metro Barat?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui apakah program keluarga harapan (PKH) berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Metro Barat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman mengenai program keluarga harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan.

### 2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan mengantisipasi agar masyarakat miskin bisa mendapatkan program keluarga harapan.

### 3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai model atau contoh penanganan program keluarga harapan (PKH).

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti dan menghindari kesalahan penafsiran, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini yaitu:

### 1. Objek penelitian

- a. Program Keluarga Harapan sebagai variabel (X)
- b. Menanggulangi kemiskinan sebagai variabel (Y)

2. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menerima program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Metro Barat.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat pengaruh

4. Waktu penelitian

Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan saat akan diteliti pada tahun 2021.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Metro Barat Kota Metro.